

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan inflasi di Kabupaten Kampar pada akhir Triwulan I (Maret 2024) berdasarkan rilis BPS terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 4,89 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,29.

Inflasi y-on-y tersebut terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 9,15 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 8,53 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami deflasi sebesar 1,42 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,45 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,24 persen; kelompok transportasi sebesar 0,41 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,94 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami deflasi sebesar 0,05 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,51 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 9,28 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,92 persen.

Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Kabupaten Kampar bulan Maret 2024 sebesar 0,67 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Kabupaten Kampar bulan Maret 2024 sebesar 2,01 persen.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Maret 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kabupaten Kampar, pada Maret 2024 terjadi inflasi y-on-y sebesar 4,89 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,19 pada Maret 2023 menjadi 109,29 pada Maret 2024. Tingkat inflasi m-to-m sebesar 0,67 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 2,01 persen.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam melakukan pengendalian inflasi, Pemerintah Kabupaten Kampar melalui TPID melakukan berbagai upaya konkret, antara lain melalui pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD teknis seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian TPH, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK, Dinas Sosial serta Perangkat Daerah lainnya yang terkait.

Dalam rangka menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H/2024 Pemerintah Kabupaten Kampar melaksanakan Operasi Pasar Murah/Gerakan Pangan Murah di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Kampar bekerjasama dengan Perum Bulog. Pelaksanaan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK dan Dinas Ketahanan Pangan.

Hasil identifikasi permasalahan dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Kampar antara lain sebagai berikut :

Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Kabupaten Kampar sebahagian besar masih tergantung kepada daerah pemasok, yaitu antara lain dipasok dari Sumatera Barat, Sumatera Utara dan daerah lainnya.

Jenis komoditas yang ketersediannya masih tergantung pasokan dari daerah lain, antara lain adalah seperti beras, cabai, telur, bawang dan sayuran lainnya.

Ketersediaan pasokan dan harga pangan di Kabupaten Kampar sangat dipengaruhi oleh

produksi di daerah penghasil dan juga dipengaruhi oleh kondisi dan kelancaran jalur distribusi. disamping itu faktor alam seperti cuaca juga sangat mempengaruhi ketersediaan dan harga di pasaran.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Kampar melalui TPID terus berupaya semaksimal mungkin, antara lain melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilitas harga di pasaran.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka pengendalian inflasi, Pemerintah Kabupaten Kampar mengoptimalkan realisasi pelaksanaan Program/Kegiatan yang ada di masing-masing OPD terkait, antara lain terkait dengan peningkatan produksi, ketahanan pangan, kelancaran distribusi, stabilisasi harga dan kegiatan lainnya yang terkait.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian yang dilaksanakan di Kabupaten Kampar antara lain :

- Melakukan percepatan pelaksanaan program/kegiatan yang telah dialokasikan melalui APBD Kabupaten Kampar Tahun 2024 pada masing-masing OPD terkait - Mengoptimalkan koordinasi dengan stake holder terkait
- Membentuk dan mengoptimalkan peran dan fungsi Tim Pemantau Harga Pangan Strategis
- Melakukan antisipasi kelancaran jalur distribusi melalui koordinasi antar OPD terkait
- Melakukan peninjauan dan sidak ke pasar-pasar atau lokasi-lokasi yang diduga berpotensi adanya penimbunan pangan yang dilakukan oleh distributor/pedagang nakal
- Melakukan pemantauan pasokan dan distribusi secara rutin pada pasar-pasar kecamatan diwilayah Kabupaten Kampar.
- Melaksanakan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka membangun sinergi pelaksanaan pengendalian inflasi, maka perlu terus meningkatkan koordinasi antar OPD dan pihak-pihak yang terkait dengan pengendalian inflasi. Perlunya meningkatkan koordinasi antara TPID Kabupaten Kampar dengan TPID kabupaten provinsi tetangga dalam rangka penyediaan dan pendistribusian barang komoditas yang produksinya terbatas atau berada di luar Kabupaten Kampar;

Perlu mengoptimalkan monitoring perkembangan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan pentin di lapangan.

Perlu mengoptimalkan produksi di daerah, antara lain melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan kosong di desa/kelurahan di seluruh wilayah di Kabupaten Kampar secara berkelanjutan, serta mengoptimalkan jumlah luasan tanaman padi di Wilayah Kabupaten Kampar, sehingga masing-masing wilayah dapat mewujudkan kemandirian pangan, dengan demikian inflasi di daerah dapat terkendali.

OPD terkait mengalokasikan anggaran program/kegiatan yang mendukung pengendalian inflasi daerah melalui APBD Kabupaten Kampar

perlu merealisasikan penggunaan dana BTT untuk mendukung pelaksanaan operasi pasar dan subsidi transportasi, sehingga harga ditingkat konsumen/masyarakat stabil sehingga inflasi lebih terkendali.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

Mengoptimalkan pelaksanaan langkah strategis pengendalian inflasi, sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Langkah strategis yang perlu dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka mengendalikan inflasi antara lain :

- melakukan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang serta melakukan monitoring ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan penting di lapangan.
- melakukan koordinasi dan mendapatkan informasi dari daerah penghasil komoditas, serta menindaklanjuti dengan melakukan Kerjasama Antar Daerah
- mengoptimalkan Rapat Koordinasi bersama anggota TPID dan stake holder terkait
- mengalokasikan dan merealisasikan penggunaan anggaran dana BTT untuk mengendalikan inflasi sesuai dengan Juknis yang telah ditetapkan pemerintah pusat, antara lain untuk mendukung kegiatan operasi pasar, subsidi transportasi dan lain sebagainya sesuai ketentuan yang berlaku
- mengoptimalkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, dalam rangka menjaga kelancaran pasokan, distribusi dan harga barang kebutuhan pokok dan penting di lapangan
- mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan pengendalian inflasi pada masing-masing OPD terkait